

Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, dan SPI Dengan TI Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Febry Miftakhul Huda¹

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, : febrymiftakhul@gmail.com

ARTICLES INFORMATION

ABSTRACT

JURNAL SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi)

Vol.5, No.3, Mei 2022
Halaman : 238 – 249

© LPPM & Prodi Manajemen
UNIVERSITAS PAMULANG

ISSN (online) : 2581-2777
ISSN (print) : 2581-2696

Keyword :

Partisipasi Masyarakat,
Kompetensi Aparatur Desa,
Sistem Pengendalian Internal,
Teknologi Informasi, dan
Akuntabilitas Pengelolaan Dana
Desa.

JEL. classification :

C33, G21, G24, N15, N25

Contact Author :

PRODI MANAJEMEN UNPAM

JL.Surya Kencana No.1
Pamulang Tangerang Selatan –
Banten
Telp. (021) 7412566, Fax (021) 7412491
Email :

sekuritas@unpam.ac.id

Riset ini bertujuan buat mengenali apakah Partisipasi Warga, Kompetensi Aparatur Desa, serta SPI Dengan TI mempengaruhi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada. Ilustrasi dalam riset ini merupakan pemerintah desa pada 10 desa di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan beberapa 60 orang. Informasi dalam riset ini ialah informasi primer dengan memakai kuesioner. Metode analisis informasi dalam riset ini memakai Aplikasi PLS. Hasil pengujian menampilkan kalau Partisipasi Warga mempengaruhi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Kompetensi Aparatur tidak mempengaruhi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Serta Sistem Pengendalian Internal dengan Teknologi Data mempengaruhi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

This study aims to determine whether Community Participation, Village Apparatus Competence, and SPI with IT have an effect on Village Fund Management Accountability. The sample in this study was the village government in 10 villages in Brondong District, Lamongan regency, with a total Of 60 people. The informasi in this study are primary informasi using a questionnaire. The informasi analysis technique in this study used PLS Aplikasi. The test results show that Community Participation has an effect on Village Fund Management Accountability. Apparatus Competence has nomor effect on Village Funs Management Accountability. And the Internal Control System with Information Technology affects the Accountability of Village Fund Management.



A. PENDAHULUAN

Desa artinya organisasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Desa dikatakan jadi ujung tombak pemerintahan daerah yang di pimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh fitur desa. Undang- undang no 6 tahun 2014 tentang desa yakni salah satu ciri dari political will yang dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai harapan buat membentuk ataupun membagikan pergantian fundamental yang di tunjukan buat rakyat. dalam UU no 6 Tahun 2014 pula mendeskripsikan itikad negeri buat mengotonomikan desa, memakai bermacam kemandirian pemerintahan desa semacam pemilihan buat calon pemimpin desa, anggaran desa, dan kemandirian pembuatan peraturan desa semacam Peraturan Wilayah, menyebabkan daerah otonomi NKRI jadi provinsi, kabupaten ataupun kota, dan desa.

Dikala ini Indonesia memprioritaskan desa dalam perihal pembangunan. Buat mewujudkan pembangunan tersebut salah satu metode pemerintah ialah dengan berikan dana desa yang diambil dari APBN(Anggaran Pemasukan serta Belanja Negeri) secara langsung buat dikelola oleh secara mandiri oleh warga(Sugiarti& Yudianto, 2017). Desa pula diberi kewenangan buat mengelola dan melaksanakan pemerintahan sendiri. Kewenangan tersebut dikatakan selaku desentralisasi yang mempunyai arti sesuatu wujud tata pemerintahan di mana kewenangan serta kekuasaan tidak terpusat, namun menyebar ke sebagian wilayah semacam dari pemerintah pusat mengarah pemerintah wilayah serta dari pemerintah wilayah mengarah pemerintah desa.

Tiap kegiatan aparatur desa Akuntabilitas jadi kontrol terhadap mengelola dana desa, sehingga kedudukan aparatur desa selaku agen jadi aspek berarti buat mempertanggung jawabkan pengelolaan dana desa(Widyatama, Novita,& Diarespati, 2017). Kompetensi menghubungkan antara pengetahuan, keahlian, keahlian dan nilai- nilai individu bersumber pada pengalaman serta pendidikan dalam rangka penerapan tugas serta kewajibannya secara efisien, efektif serta handal(Moeheriono, 2018). Dengan kompetensi yang kompeten pula bisa mendesak aparatur desa dalam menguasai metode pengelolaan dana desa yang baik serta benar. Apabila aparatur kandas dalam menguasai perihal tersebut hingga hendak berakibat pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuatnya, serta kesalahan laporan dengan standar yang terdapat dalam pemerintahan, sehingga data yang diberikan kepada warga jadi tidak pas serta pula bisa pengaruhi keputusan yang hendak diambil kedepanya(Medianti, 2018).

Pemanfaatan teknologi data pula diperlukan dalam mengelola dana desa disebabkan sanggup membagikan kemudahan untuk organisasi buat menuntaskan pekerjaannya(Perdana, 2018). Pemakaian teknologi data pula diperlukan dalam pelaporan keuangan yang baik serta benar. Pemanfaatan teknologi data mencakup terdapatnya pengolahan informasi, pengolahan data, sistem manajemen serta prosedur kerja secara elektronik supaya layanan publik tidak mahal serta bisa secara gampang di akses oleh warga.

Secara universal kasus dari penerapan pengelolaan dana desa di bermacam desa terletak pada belum maksimalnya fitur desa dalam melakukan pertanggungjawaban, minimnya partisipasi buat tingkatan akuntabilitas selaku sesuatu reaksi warga sebab ketidakpercayaannya terhadap pemerintah desa. Perihal ini bisa nampak dari sebagian permasalahan penyelewengan dana desa di Kabupaten Lamongan. Semacam contoh permasalahan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Brondong. Permasalahan terjalin kala segala ATM masyarakat penerima PKH dipegang oleh kepala koordinator di tiap- tiap desa, spesialnya penerima yang berumur lanjut umur. Perihal ini telah mulai terjalin dari tahun 2017, sepanjang 3 3 tahun masyarakat Desa Sendangharjo tidak menerima sepeserpun duit dari PKH, sehabis diselidiki pihak terpaut nyatanya duit tersebut telah ditarik buat kepentingan individu lewat ATM masyarakat penerima dengan jumlah kisaran 8 sampai 11 juta rupiah.([https:// www. google. com/ amp/ s/ r mol. id/ amp/ 2020/ 12/ 03/ 463951/ pkh- tidak- sampai- di- tangan- warga- brondong- lamongan- minta- kemensos- turun- tangan,](https://www.google.com/amp/s/rmol.id/amp/2020/12/03/463951/pkh-tidak-sampai-di-tangan-warga-brondong-lamongan-minta-kemensos-turun-tangan, diakses Kamis, 03 Desember 2020) diakses Kamis, 03 Desember 2020).



Dari kasus secara universal tersebut bisa ditarik kesimpulan kalau kasus berasal dari aspek sumber energi manusia aparat desa dalam pembuatan pertanggungjawaban aktivitas pembangunan serta kurang terdapatnya koordinasi yang baik dengan lembaga terpaut sehingga membatasi proses penerapan pengelolaan dana desa. Semacam contoh di salah satu desa yang terletak di kabupaten Lamongan, tepatnya di desa Sedayulawas ada kasus terhadap penerapan pengelolaan dana desa yang belum cocok harapan. Teruji kalau masih kurang transparansi yang dicoba oleh kepala desa dengan masih belum terdapatnya papan pengumuman besaran dana yang di keluarkan sehabis melakukan pembangunan yang berasal dari usulan warga. Tidak hanya itu dalam melakukan pembangunan masih mengandalkan borongan ataupun proyek dari luar walaupun masih terdapat warga yang turut dalam melakukan pembangunan.

Di dalam proses penerapan pembangunan pula pemerintah Desa masih meminjam kepada pihak ketiga buat melakukan aktivitas pembangunan mulai dari pembelian bahan-bahan material buat pembangunan serta buat berikan upah kepada tukang. Hendak namun aspek itu tidak jadi penghambat pemerintah Desa buat senantiasa melakukan aktivitas pembangunan yang berasal dari usulan warga, disebabkan tadinya telah terdapat perjanjian antara pemerintah Desa dengan pihak ketiga buat meminjam dana dalam melakukan aktivitas pembangunan. Nantinya sehabis Dana Desa yang diberikan oleh pusat cair hingga hendak langsung dibayarkan oleh pemerintah Desa ke pihak ketiga buat membayar hutang tersebut. Semacam yang ditulis dalam tribunjatim.com, 13 April 2017.

Tidak hanya itu, pada bertepatan pada 17 Juni 2021 beberapa masyarakat Desa Koru Kabupaten Lamongan pula memberi tahu mantan kepala desa(Kades) ke Kejaksaan Negara(kejar), perihal ini disebabkan dugaan penyelewengan alokasi dana desa(ADD) yang nilainya nyaris menggapai puluhan pula rupiah. Dikemukakan oleh Isyadul Ibad di Kantor Kejaksaan Negara Lamongan berkata kalau“ Dana itu mestinya digunakan buat pembangunan pagar, kanopi, paving di taman balai desa. Tetapi proyek itu sampai saat ini tidak berwujud. Ini kan jadi persoalan besar”. Tidak hanya itu, pula terdapat dugaan penilapan anggaran yang lain semacam pembangunan fasilitas air bersih(SAB) yang tidak terealisasi. Proyek tersebut memakai dana desa(DD) sebesar 75 juta tahun anggaran 2017.([https:// www. google. com/ amp/ s/ jatim. suara. com/ amp/ read/ 2021/ 06/ 17/ 131634/ eks- kepala- desa- di- lamongan- diduga- menyelewengkan- dana- desa](https://www.google.com/amp/s/jatim.suara.com/amp/read/2021/06/17/131634/eks-kepala-desa-di-lamongan-diduga-menyelewengkan-dana-desa), diakses Kamis, 17 Juni 2021).

Minimnya pengendalian dana desa di Kabupaten Lamongan pula dibuktikan dengan terdapatnya Penyelidikan oleh Kejaksaan Besar(Kejati) Jawa Timur ke beberapa desa di Kecamatan Modo, Glagah, serta sebagainya. Kasi Penkum Kejati Jatim ialah Anggara Suryanegara berkata kalau Kejati sudah melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan penyelewengan dana desa yang tidak cocok dengan regulasi peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada hasil pengumpulan informasi(Puldata) serta pengumpulan bahan penjelasan(Pulbaket). Buat total serta desa yang tidak cocok peruntukannya menggapai Rp 16, 5 miliar dengan total 240 desa dalam pantauan spesial tubuh berarti negeri serta Kejati.([https:// www. google. com/ amp/ s/ meter. republika. co. id/ amp/ qahtuo396](https://www.google.com/amp/s/meter.republika.co.id/amp/qahtuo396)) diakses Selasa, 04 Agustus 2020). Ini jadi salah fakta tentang kasus yang diakibatkan sebab tidak terdapatnya transparansi ataupun keterbukaan dari pemerintah desa kepada warga terhadap pengelolaan dana desa yang diberikan dari pemerintah pusat lewat anggaran pemasukan serta belanja Negeri(APBN). Hingga dari itu, pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa yang bersumber dari dana desa wajib mengaitkan warga secara utuh biar tidak terdapat kecurigaan dari warga kepada pemerintah Desa dalam pembangunan yang bersumber dari dana desa.

Memandang latar balik dan fakta terdapatnya korupsi yang terletak di salah satu desa di kecamatan Brondong hingga periset bermaksud meneliti dengan melaksanakan replikasi riset terdahulu dari riset Siti Sarah, Larastika Medianti, serta Anam Masruhin. Menimpa Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Data, Partisipasi Warga serta SPI terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa(Riset di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan). Hasil penelitiannya berkata kalau variabel



kompetensi aparatur, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi data, partisipasi warga, serta sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, riset ini mengambil judul “Pengaruh Partisipasi Warga, Kompetensi Aparatur Desa, serta SPI Dengan TI Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”

B. KAJIAN LITERATUR

Partisipasi Masyarakat

Adi (2008) “partisipasi warga merupakan warga yang turut dan dalam proses pengidentifikasian permasalahan serta kemampuan yang terdapat di warga, penerapan upaya menanggulangi permasalahan, pemilihan serta pengambilan keputusan berkaitan dengan pemecahan alternatif dalam menanggulangi permasalahan, serta mengevaluasi pengantian yang terjalin.”

Kompetensi Aparatur Desa

Bagi Peraturan Keputusan Kepala Tubuh Kepegawaian Negeri (BKN) No 46 A Tahun 2003 “kalau kompetensi merupakan kemampuan serta keistimewaan yang dipunyai oleh seseorang pegawai negara berbentuk pengetahuan, keahlian, serta perilaku sikap yang dibutuhkan dalam penerapan tugas letaknya, sehingga pegawai tersebut bisa melaksanakan kewajiban secara efektif, efisien serta handal.”

Sistem pengendalian intern pemerintah

Sistem pengendalian intern pemerintah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) “mendefinisikan sistem pengendalian internal pemerintah yakni proses yang integral pada aksi serta aktivitas yang dicoba secara terus menerus oleh pimpinan serta segala pegawai buat membagikan kepercayaan yang mencukupi atas tercapainya tujuan organisasi lewat aktivitas yang efisien serta efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan peninggalan negeri, serta ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan.”

Teknologi Informasi

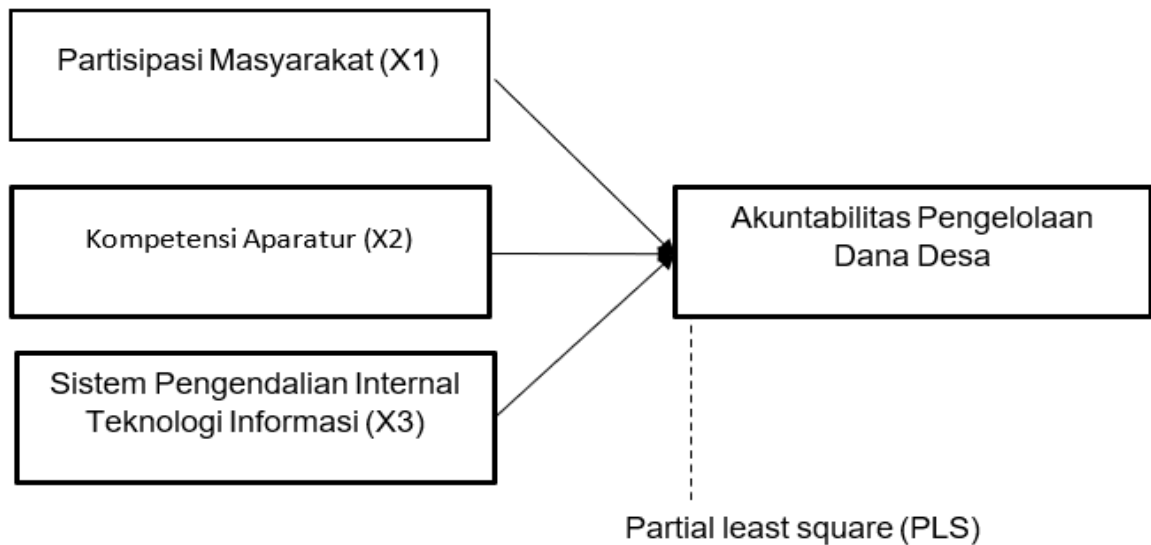
Bagi Haag& Keen (1996) dalam Murhada&Giab (2011) “menarangkan teknologi data merupakan suatu perlengkapan ataupun fitur yang mendukung pekerjaan dengan memakai data serta mengerjakan tugas ataupun kewajiban yang berkaitan ataupun berhubungan dengan pemrosesan data.”

Akuntabilitas

Bagi pemikiran Dwiyanto (2012) dalam Banga (2017), “akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban para pembentuk kebijakan kepada masyarakat. Ini berarti kalau dibutuhkan terdapatnya pertanggungjawaban dari pemerintah ataupun eksekutif selaku penentu kebijakan sekaligus selaku eksekutor kebijakan terhadap masyarakat warga guna mengenali telah sepanjang mana pihak pemerintah sudah merealisasikan kebijakannya dalam usaha buat penuh kemauan warga.”



Kerangka Berpikir



Hipotesis

Berdasarkan teori dan kerangka konseptual di atas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

- H1: Terdapat pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
- H2: Terdapat pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
- H3: Terdapat pengaruh Sistem Pengendalian Internal Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis riset yang dipakai dalam riset ini merupakan riset kuantitatif yang menganalisis pengaruh partisipasi warga, kompetensi aparatur desa, serta sistem pengendalian internal pemanfaatan teknologi data terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang terletak di kecamatan Brondong kabupaten Lamongan. Informasi Dalam riset ini sumber informasi yang digunakan merupakan informasi primer. Pengumpulan informasi pada riset ini dicoba dengan metode survey ialah dengan membagikan kuesioner yang langsung diserahkan kepada responden di desa se- Kecamatan Tarub.

Metode analisis informasi digunakan buat menanggapi rumusan permasalahan ataupun menguji hipotesis yang sudah diformulasikan. Pengelolaan informasi pada riset ini hendak memakai Aplikasi smartPLS. Tujuan dari pemakaian(Partial Least Square) PLS ialah buat melaksanakan prediksi. Yang mana dalam melaksanakan prediksi tersebut merupakan buat memprediksi ikatan antar konstruk, tidak hanya itu buat menolong periset dalam penelitiannya buat memperoleh nilai variabel laten yang bertujuan buat melaksanakan pemprediksian.



D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Convergent Validity

Outer Loading Tahap 1

| | (X1) Partisipasi Masyarakat | (X2) Kompetensi Aparatur | (X3) SPI dan TI | (Y) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa |
|--------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|---|
| X1.1.1 | 0.798 | | | |
| X1.1.2 | 0.349 | | | |
| X1.2 | 0.780 | | | |
| X1.3 | 0.594 | | | |
| X1.4.1 | 0.422 | | | |
| X1.4.2 | 0.540 | | | |
| X2.1.1 | | 0.653 | | |
| X2.1.2 | | 0.796 | | |
| X2.2 | | 0.784 | | |
| X2.3 | | 0.693 | | |
| X2.4 | | 0.608 | | |
| X2.5 | | 0.798 | | |
| X3.1 | | | 0.795 | |
| X3.2 | | | 0.659 | |
| X3.3 | | | 0.742 | |
| X3.4 | | | 0.853 | |
| X3.5 | | | 0.763 | |
| X3.6 | | | 0.778 | |
| Y1.1 | | | | 0.816 |
| Y1.2 | | | | 0.913 |
| Y1.3 | | | | 0.942 |
| Y1.4 | | | | 0.943 |
| Y1.5 | | | | 0.882 |

Bersumber pada olah informasi pada foto diatas bisa dilihat kalau outer loading sesi satu ada hasil yang bercorak merah yang mempunyai nilai dibawah 0, 70. perihal ini menunjukkan kalau tidakenuhi kriteria batasan minimum pengukuran, serta nilai outer loading antara 0, 5– 0, 6 telah dikira lumayan. serta pada sesi ini belum menghapus indikator- indikator yang mempunyai nilai loading aspek dibawah 0, 70.



Outer loading Tahap 2

| | (X1) Partisipasi Masyarakat | (X2) Kompetensi Aparatur | (X3) SPI dan TI | (Y) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa |
|--------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|---|
| X1.1.1 | 0.803 | | | |
| X1.2 | 0.823 | | | |
| X1.3 | 0.532 | | | |
| X1.4.2 | 0.565 | | | |
| X2.1.1 | | 0.653 | | |
| X2.1.2 | | 0.796 | | |
| X2.2 | | 0.784 | | |
| X2.3 | | 0.693 | | |
| X2.4 | | 0.608 | | |
| X2.5 | | 0.798 | | |
| X3.1 | | | 0.795 | |
| X3.2 | | | 0.659 | |
| X3.3 | | | 0.742 | |
| X3.4 | | | 0.853 | |
| X3.5 | | | 0.763 | |
| X3.6 | | | 0.778 | |
| Y1.1 | | | | 0.817 |
| Y1.2 | | | | 0.913 |
| Y1.3 | | | | 0.942 |
| Y1.4 | | | | 0.942 |
| Y1.5 | | | | 0.881 |

Bersumber pada olah informasi pada foto diatas bisa dilihat kalau outer loading sesi 2 ada hasil yang mempunyai nilai 0, 70 bisa dilihat kalau outer loading sesi 2 ada hasil yang mempunyai nilai 0, 70. bisa dilihat kalau outer loading sesi 2 ada hasil yang mempunyai nilai 0, 70. perihal ini menunjukkan kalau penuh kriteria batasan minimum pengukuran, serta bisa dilihat kalau outer loading sesi 2 ada hasil yang mempunyai nilai 0, 5- 0, 6. pada sesi ini telah menghapus indikator- indikator yang mempunyai nilai loading aspek dibawah 0, 7.



Dicriminant Validity

Fornell-Larcker Criterion

| | (X1) Partisipasi Masyarakat_ | (X2) Kompetensi Aparatur | (X3) SPI dan TI | (Y) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa |
|---|------------------------------|--------------------------|-----------------|---|
| (X1) Partisipasi Masyarakat_ | 0.694 | | | |
| (X2) Kompetensi Aparatur | 0.517 | 0.726 | | |
| (X3) SPI dan TI | 0.515 | 0.476 | 0.767 | |
| (Y) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | 0.714 | 0.582 | 0.704 | 0.900 |

VALIDITAS KONSTRUK/VARIABEL (CONSTRUCT VALIDITY)

| | Cronbach's Alpha | rho_A | Composite Reliability | Average Variance Extracted (AVE) |
|---|------------------|-------|-----------------------|----------------------------------|
| (X1) Partisipasi Masyarakat_ | 0.625 | 0.682 | 0.782 | 0.482 |
| (X2) Kompetensi Aparatur | 0.827 | 0.854 | 0.869 | 0.527 |
| (X3) SPI dan TI | 0.860 | 0.869 | 0.895 | 0.589 |
| (Y) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | 0.941 | 0.944 | 0.955 | 0.810 |

Bersumber pada olah informasi pada foto diatas, variabel kompetensi aparatur, variabel SPI serta TI serta variabel akuntabilitas pengelola dana desa mempunyai nilai AVE baik yang bercorak hijau, sehingga bisa dinyatakan kalau indikator- indikator yang digunakan dalam riset ini sudah mempunyai discriminant validity yang baik dalam menyusun tiap- tiap variabelnya. Sebaliknya variabel partisipasi warga mempunyai nilai AVE baik yang bercorak merah sehingga bisa dinyatakan kalau indikator- indikator yang digunakan dalam riset ini tidak mempunyai discriminant validity yang baik dalam menyusun tiap- tiap variabelnya.

Composite reliability

| | Cronbach's Alpha | rho_A | Composite Reliability | Average Variance Extracted (AVE) |
|---|------------------|-------|-----------------------|----------------------------------|
| (X1) Partisipasi Masyarakat_ | 0.625 | 0.682 | 0.782 | 0.482 |
| (X2) Kompetensi Aparatur | 0.827 | 0.854 | 0.869 | 0.527 |
| (X3) SPI dan TI | 0.860 | 0.869 | 0.895 | 0.589 |
| (Y) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | 0.941 | 0.944 | 0.955 | 0.810 |

Bersumber pada olah informasi pada foto diatas, variabel partisipasi warga, variabel kompetensi aparatur, variabel SPI serta TI serta variabel akuntabilitas pengelola dana desa mempunyai nilai composite reliability baik yang bercorak hijau, sehingga bisa dinyatakan



kalau indikator- indikator yang digunakan dalam riset ini sudah mempunyai discriminant validity yang baik dalam menyusun tiap- tiap variabelnya.

Cronbach's Alpha

| | Cronbach's Alpha | rho_A | Composite Reliability | Average Variance Extracted (AVE) |
|---|------------------|-------|-----------------------|----------------------------------|
| (X1) Partisipasi Masyarakat | 0.625 | 0.682 | 0.782 | 0.482 |
| (X2) Kompetensi Aparatur | 0.827 | 0.854 | 0.869 | 0.527 |
| (X3) SPI dan TI | 0.860 | 0.869 | 0.895 | 0.589 |
| (Y) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | 0.941 | 0.944 | 0.955 | 0.810 |

Bersumber pada olah informasi pada foto diatas, variabel kompetensi aparatur, variabel SPI serta TI serta variabel akuntabilitas pengelola dana desa mempunyai nilai cronbach' s alpha baik yang bercorak hijau, sehingga bisa dinyatakan kalau indikator- indikator yang digunakan dalam riset ini sudah mempunyai discriminant validity yang baik dalam menyusun tiap- tiap variabelnya. Sebaliknya variabel partisipasi warga mempunyai nilai cronbach' s alpha baik yang bercorak merah sehingga bisa dinyatakan kalau indikator- indikator yang digunakan dalam riset ini tidak mempunyai nilai cronbach' s alpha yang baik dalam menyusun tiap- tiap variabelnya.

Analisa Inner Model

Koefisien Determinan (R2)

| | R Square | R Square Adjus... |
|---|----------|-------------------|
| (Y) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | 0.685 | 0.666 |

Predictive Relevance (Q2)

Q- square mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model serta ditaksir parameternya. Nilai Q- square lebih besar dari 0(nol) menampilkan kalau model memiliki nilai predictive relevance, sebaliknya apabila nilai Q- square kurang dari 0(nol), hingga menampilkan kalau model kurang mempunyai predictive relevance.

| | SSO | SSE | Q ² (= 1-SSE/SSO) |
|---|---------|---------|------------------------------|
| (X1) Partisipasi Masyarakat | 216.000 | 216.000 | |
| (X2) Kompetensi Aparatur | 324.000 | 324.000 | |
| (X3) SPI dan TI | 324.000 | 324.000 | |
| (Y) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | 270.000 | 125.833 | 0.534 |

Bersumber pada olah informasi pada foto diatas, menampilkan kalau nilai predictive relevance(Q2) sebesar 0. 534. Perihal ini bisa disimpulkan kalau model struktural yang dihasilkan nilai observasi sebesar 0. 534.



Uji Hipotesis

| | Original Sample (O) | Sample Mean (M) | Standard Deviation (STDEV) | T Statistics (O /STDEV) | P Values |
|---|---------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|----------|
| (X1) Partisipasi Masyarakat_ -> (Y) Aku... | 0.415 | 0.402 | 0.137 | 3.028 | 0.003 |
| (X2) Kompetensi Aparatur -> (Y) Akunt... | 0.173 | 0.168 | 0.092 | 1.884 | 0.060 |
| (X3) SPI dan TI -> (Y) Akuntabilitas Pen... | 0.408 | 0.424 | 0.129 | 3.172 | 0.002 |

Hipotesis yg di hasilkan:

- H1: Terdapat pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
H2: Tidak terdapat pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
H3: Terdapat pengaruh Sistem Pengendalian Internal dengan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

E. KESIMPULAN

Bersumber pada hasil riset yang sudah dicoba, hingga bisa disimpulkan sebagian perihal selaku berikut:

1. Pengaruh Partisipasi Warga terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa teruji mempengaruhi signifikan. Hingga hipotesis yang diajukan terpaut dengan, "Partisipasi Warga Mempengaruhi Secara Langsung Terhadap Akuntabilitas Laporan Dana Desa" memperoleh sokongan di dalam riset ini.
2. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa teruji tidak mempengaruhi positif serta tidak signifikan. Hingga hipotesis yang diajukan terpaut dengan, "Kompetensi Aparatur Mempengaruhi Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa" tidak memperoleh sokongan disebabkan arah pengaruh yang negatif di dalam riset ini.
3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dengan Teknologi Data terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa teruji mempengaruhi positif serta signifikan. Hingga hipotesis yang diajukan terpaut dengan, "Pengendalian Internal dengan Teknologi Data Mempengaruhi Positif Terhadap Akuntabilitas Laporan Dana Desa" memperoleh sokongan dengan arah pengaruh yang positif di dalam riset ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
Adi, Rukminto Isbandi. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
Adi, & Isbandi, R. (2007). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
Arnstein, S. R. (1969). Arnstein-ladder-of-citizen-participation_en (1). *Journal of American Institute of Planners*.



- Banga, W. (2017). *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Agency Problems and Residual Claims. *The Journal of Law & Economics*, 26, 23. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/725105>
- Ghozali, I., Latan, & Hengki. (2012). *Partial Least Squares Konsep, Teknik, dan Aplikasi SmartPLS 2.0M3*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., Latan, & Hengki. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. (8th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartanto, E. (2017). *Teori Kompetensi Manajemen Sumber Daya Manusia*.
- Heller, de K., Monahan, J., Price, R. H., Reinharz, S., Riger, S., & Más, 4. (1984). *Psychology and Community Change*.
- Holil, S. (1980). *Partisipasi Sosial Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial.
- Husain, T., & Sunardi, N. (2020). Firm's Value Prediction Based on Profitability Ratios and Dividend Policy. *Finance & Economics Review*, 2(2), 13-26.
- Huraerah, A. (2008). *PENGGORGANISASIAN dan PENGEMBANGAN MASYARAKAT: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Humaniora, 2008.
- Indonesia, K. R. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. In *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Desa*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kadim, A., & Sunardi, N. (2022). Financial Management System (QRIS) based on UTAUT Model Approach in Jabodetabek. *International Journal of Artificial Intelligence Research*, 6(1).
- Kadim, A., Sunardi, N & Husain, T. (2020). The modeling firm's value based on financial ratios, intellectual capital and dividend policy. *Accounting*, 6(5), 859-870
- Lesmana, R., Sunardi, N., & Kartono. The Effect of Financing and Online Marketing on MSMEs Income Increasing at Intermoda Modern Market BSD City Tangerang Selatan. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(7), 25-34
- Lesmana, R., & Sunardi, N. (2021). Futuristic Leadership Through PEKA Analysis Approach. *HUMANIS (Humanities, Management and Science Proceedings)*, 2(1).
- Loekman, S. (1995). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta :Kanisius.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING 'GOODWILL'*. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Medianti, L. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa - Desa di Kabupaten Bintan). *Jom Feb*.
- Moeheriono. (2012). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Moeheriono. (2018). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*.
- Murhada, & Giab. (2011). *Pengantar Teknologi Informasi*. Tangerang: Mitra Wacana Media.



- Nardi Sunardi Et Al (2020). Determinants of Debt Policy and Company's Performance, International Journal of Economics and Business Administration Volume VIII Issue 4, 204-213
- Nurkhasanah, I. (2019). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa se-Kecamatan Pringsurat)*.
- Peraturan, P. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Perdana, K. W. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul. *Program Studi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta*.
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. (n.d.).
- Ross, M., & Lippin, B. W. (1967). *Community Organization; Theory, Principles, and Practice*. New York, Harper & Row.
- Saragih, R., & Agung, S. (2017). Peran Komunikasi politik Pemerintah dalam Upaya Peningkatan Partisipatif Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana Desa. *Vol. 7 No. 1 (2017)*.
- Sholihin, & Ratmono. (2013). *Sholihin dan Ratmono, 2013:2* (1st ed.). CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Soleh, Chabib, & Rochansjah, heru. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Sugiarti, E., & Yudianto, I. (2017). Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Proceedings Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice*.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (cetakan 23). Bandung: alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, W. (2015). *Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press.
- Sunardi, N., & Lesmana, R. (2020). Konsep Icepower (Wiramadu) sebagai Solusi Wirausaha menuju Desa Sejahtera Mandiri (DMS) pada Masa Pandemi Covid-19. *JIMF (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma)*, 4(1).
- Ulum, I. (2005). *Akuntansi Sektor Publik Sebuah Pengantar*. Malang: UMM Press.
- Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. (n.d.).
- Uphoff, N. T., & Cohen, J. M. (1977). *Rural development participation : concepts and measures for project design, implementation and evaluation*. New York : Itacha.
- Wibowo. (2010). *Manajemen Kinerja*. Jakarta:Rajawali Per.
- Wilkinson, J. W., & Cerullo, M. (2000). *Coounting Information System: Essential Concept and Application*. (Edisi 3). New York: John Willey and Sons.

